

EFEK MEMILIKI PENDAPATAN DAERAH,  
PENGALOKASIAN DANA UMUM, DAN DANA KHUSUS  
PADA BELANJA MODAL  
DI KOTA DAN KABUPATEN SUMATERA UTARA

Anggiat Situngkir \*)  
John Sihar Manurung \*\*)

Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Medan

Abstract

*The purpose of this research is to find out and to analyze whether Local Own Revenue, General Allocation Fund, Special Allocation Fund influence the Capital Expenditure in North Sumatera Province. The analyze method that is used in this research is quantitative method with multiple linier regression with bring about classical assumption test before finding out the best linier model. The variable used in this research are Local Own Revenue, General Allocation Fund, Special Allocation Fund as independent variable and the Capital Expenditure as dependent variable. The population is 33 regencies and cities in North Sumatera, and by using purposive sampling technique, 19 regencies and cities in North Sumatera Province the year 2004 up to year 2007 are chosen as samples. The result proof that Local Own Revenue, General Allocation Fund, Special Allocation Fund influence significantly and simultaneously the Capital Expenditure of regencies and cities in North Sumatera. Adjusted R<sup>2</sup> expressed that 70,9% influence given by Independent variables. The rest 29,1% influence given by other variables is not mentioned in this research model, Partially Local Own Revenue, General Allocation Fund, Special Allocation Fund variable influence Capital Expenditure. This implies to the heads of regencies and cities goverment that General Allocation Fund is a means of even distribution due to fiscal gap, fiscal needs and fiscal capacities determinant to meet the composition of capital expenditure of Regencies and cities in North Sumatera Province.*

**Keywords** : Regional Own Revenue, Allocation Fund, and Capital Expenditure.

1. PENDAHULUAN

Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), pengalokasian sumberdaya merupakan permasalahan yang mendasar dalam penganggaran sektor publik. Keterbatasan sumberdaya sebagai akar masalah utama dalam pengalokasian anggaran sektor publik dapat diatasi dengan pendekatan ilmu ekonomi melalui berbagai

teori. Tuntutan untuk mengubah struktur belanja menjadi semakin kuat, khususnya pada daerah-daerah yang mengalami kapasitas fiskal rendah (Halim, 2001).

Pergeseran komposisi belanja merupakan upaya logis yang dilakukan pemerintah daerah setempat dalam rangka meningkatkan tingkat kepercayaan publik. Pergeseran ini ditujukan untuk peningkatan

\*) Anggiat Situngkir, Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Medan (Penulis Utama)

\*\*) John Sihar Manurung, Jurusan Administrasi Niaga Politeknik Negeri Medan

investasi modal dalam bentuk aset tetap, semakin tinggi tingkat investasi modal diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan publik, karena itu anggaran belanja modal merupakan prasyarat utama dalam memberikan pelayanan publik oleh pemerintah daerah.

Selama ini belanja daerah lebih banyak digunakan untuk belanja rutin yang relatif kurang produktif. Saragih (2003) menyatakan bahwa pemanfaatan belanja hendaknya dialokasikan untuk hal-hal produktif, misal untuk melakukan aktivitas pembangunan.

Kebijakan otonomi daerah merupakan pendelegasian kewenangan yang disertai dengan penyerahan dan pengalihan pendanaan, sarana dan prasarana dan sumber daya manusia (SDM) dalam kerangka desentralisasi fiskal. Menurut Mardiasmo (2002) saat ini masih banyak masalah yang dihadapi pemerintah daerah terkait dengan upaya meningkatkan penerimaan daerah. Keterbatasan infrastruktur seperti sarana dan prasarana yang tidak mendukung untuk investasi menimbulkan pertanyaan bagaimana sebenarnya alokasi PAD terhadap Anggaran belanja modal, Apakah karena PAD yang rendah atau alokasi yang kurang tepat?. Studi Abdullah (2004) menemukan adanya perbedaan preferensi antara eksekutif dan legislatif dalam pengalokasian *spread* PAD ke dalam belanja sektoral. Alokasi untuk infrastruktur dan DPRD mengalami kenaikan, tapi alokasi untuk belanja modal justru mengalami penurunan. Abdullah (2004) menduga *power* legislatif yang sangat besar menyebabkan diskresi atas penggunaan *spread* PAD tidak sesuai dengan preferensi publik.

Abdullah & Halim (2004) menemukan bahwa sumber pendapatan daerah berupa PAD dan dana perimbangan berpengaruh terhadap belanja daerah secara keseluruhan. Meskipun proporsi PAD maksimal hanya sebesar 10% dari total pendapatan daerah, kontribusinya terhadap pengalokasian anggaran cukup besar, terutama bila dikaitkan dengan kepentingan politis (Abdullah, 2004).

Dana Alokasi Umum, adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya didalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Berdasarkan penelitian empiris yang dilakukan oleh Holtz-Eakin et. al.

(1985) dalam Darwanto dan Yustikasari (2007) menyatakan bahwa terdapat keterkaitan sangat erat antara transfer dari pemerintah pusat dengan belanja pemerintah daerah.

Dana Alokasi Khusus, merupakan dana yang berasal dari APBN dan dialokasikan ke daerah kabupaten/kota untuk membiayai kebutuhan tertentu yang sifatnya khusus, tergantung tersedianya dana dalam APBN (Suparmoko;2002). DAK juga memiliki pengaruh terhadap anggaran belanja modal, karena DAK ini juga cenderung akan menambah aset tetap yang dimiliki oleh pemerintah guna meningkatkan pelayanan publik.

Menurut Darwanto dan Yustikasari (2007) bahwa Pertumbuhan Ekonomi, PAD dan DAU berpengaruh positif terhadap pengalokasian belanja modal dalam APBD dan secara parsial DAU dan PAD berpengaruh secara signifikan terhadap anggaran belanja modal, sedangkan pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh secara signifikan. Penelitian ini menguji kembali penelitian-penelitian sebelumnya dengan menambahkan variabel Dana Alokasi Khusus dengan objek serta periode waktu penelitian yang berbeda dan menghilangkan variabel pertumbuhan ekonomi karena tidak berpengaruh signifikan.

**Originalitas Penelitian.** Penelitian ini merupakan penelitian relasional yang akan menguji pengaruh, DAU, DAK dan PAD terhadap Anggaran Belanja Modal pada Pemko/Pemkab Sumatera Utara dan merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Darwanto dan Yustikasari (2007). Perbedaan penelitian ini dengan yang dilakukan oleh Darwanto terletak pada variabel yang diteliti dengan menghilangkan variabel pertumbuhan ekonomi dan menambah variabel Dana Alokasi Khusus serta objek dan periode waktu penelitian yang berbeda.

**Penyusunan Anggaran Sektor Publik di Indonesia.** Anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial, sedangkan penganggaran adalah proses atau metode untuk mempersiapkan suatu anggaran (Mardiasmo, 2002).

Proses pembuatan keputusan pengalokasian belanja modal menjadi sangat dinamis karena keterbatasan sumber daya yang dimiliki serta terdapat banyak pihak dengan kepentingan dan



















































































































































































